

**S.I.N beta 1.0 UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DARI
SEKTOR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



DISIAPKAN OLEH:

GLORIOUS BIMA SIGMATARA

041311323054

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

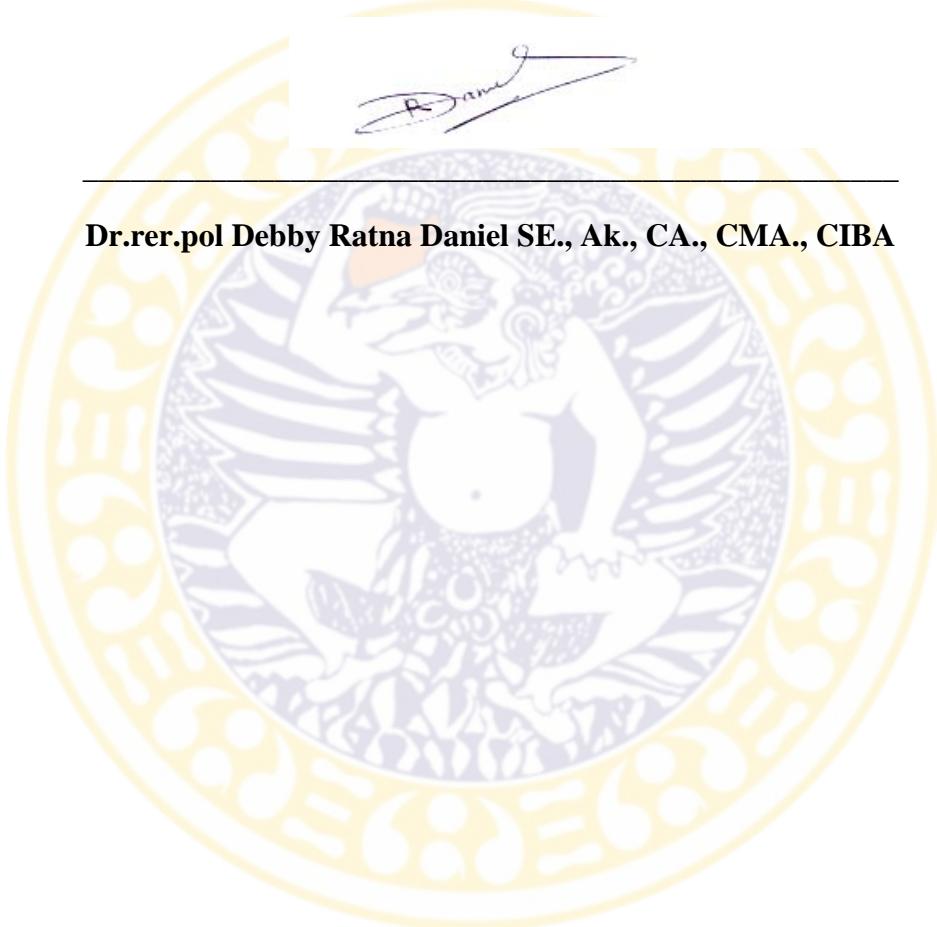
2016

Surabaya,.....

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji,
Dosen Pembimbing**



Dr.rer.pol Debby Ratna Daniel SE., Ak., CA., CMA., CIBA



SKRIPSI

**S.I.N beta 1.0 UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DARI
SEKTOR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

DIAJUKAN OLEH
GLORIOUS BIMA SIGMATARA
NIM: 041311323054

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. rer. pol. DEBBY R. DANIEL, Ak., CMA, CA., CIBA

TANGGAL 15 Februari 2016

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,

ADE PALUPI, SE., MPPM., Ph.D., Ak

TANGGAL 15/02/2016

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Glorious Bima Sigmatara, 041311323054), menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil penjiplakan (Plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.



NIM: 041311323054

...

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang maha Esa yang dalam berbagai nama dipanggil oleh berbagai budaya, yang penulis kenal dalam pribadi Yesus Kristus yang selalu melimpahkan Kasih Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**S.I.N beta 1.0 UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI.**” Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Selama proses penelitian hingga selesaiya skripsi ini, penulis sadar bahwa banyak pihak yang berperan memberikan bantuan kepada penulis sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Dian Agustia, S.E., Msi., Ak., CMA., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga;
2. Drs. Agus Widodo, M., M.Si., Ak., CMA selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga;
3. Ade Palupi, SE., MPPM., Ph.D., Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
4. Dr. rer. pol. Debby R. Daniel, Ak., CMA, CA., CIBA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi;
5. Drs. Hendarjanto, M.Si., Ak selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat selama proses perkuliahan;

6. Keluarga penulis, Bapak Sri Budiyono, Ibu Sri Purwaningsih, Raina Grahadika Puri A.Md, dan Gracecia Omega Nanda yang tidak pernah berhenti percaya kepada penulis untuk selalu memberikan yang terbaik walaupun berat dilakukan.
7. Teman-teman sesama bimbingan Bu Debby, yang selama ini sudah sama-sama berjuang dengan giat dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih atas pengalaman, semangat, dan canda. Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran yang berharga untuk setiap waktu yang sudah diluangkan Bu Debby selama bimbingan. Semoga silahturahmi dalam grup bisa tetap terjalin dengan baik sampai nanti. sukses untuk kita semua!
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
9. Bapak Afid Nurcahya selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Surabaya Jagir, yang sudah rela meluangkan waktunya untuk selalu bisa penulis ajak untuk konsultasi dan wawancara
10. Bapak Eriya yang sudah sedemikian baik menerima penelitian Skripsi ini untuk dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Surabaya Jagir
11. Ibu Sinta, Selaku Corporate Secretary Kantor Pusat Bank Jatim, yang sudah membantu mengarahkan penelitian ke departemen terkait, meskipun departemen yang dirujuk kurang tepat, dan kemudian meninggalkan penulis tanpa arahan dengan alasan PEKERJAAN DI BANK JATIM banyak.
12. Bapak Agus, Selaku Pegawai Dispenduk Capil Surabaya, yang sudah berkenan menerima dan mendukung penelitian penulis.
13. Seluruh teman S1 Akuntansi Alih Jenis tahun 2013, terimakasih atas kerjasama, ilmu, dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberi bantuan dan dukungan dalam penyelesaian ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 27 Januari 2016

Penulis,

Glorious Bima Sigmatara

ABSTRAK

Jika mendengar Pajak Penghasilan Orang Pribadi pasal 21 UU No.36 Tahun 2008, maka akan terbayang dengan sebuah keadaan yang rumit dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporannya. Data statistik BPS per bulan Agustus tahun 2012, tercatat sebanyak 118,05 juta jiwa angkatan kerja dimana 112,81 juta jiwanya merupakan angkatan kerja yang bekerja. PB Taxand, selaku Kantor Konsultan Pajak, merilis dalam websitenya bahwa, jumlah pemilik NPWP sampai akhir 2012 baru 24,81 juta. Perinciannya: 22,13 juta wajib pajak pribadi, sebanyak 2,13 juta wajib pajak badan dan sebanyak 545.232 wajib pajak bendaharawan instansi pemerintah. Pernyataan tersebut menjelaskan dilema kepatuhan wajib pajak yang dirasakan Indonesia. Sistem *Self Assesment* Indonesia, terang terangan memiliki *Loophole* dalam undang undang perpajakannya terkait syarat subyektif dan obyektif wajib pajak.

Penelitian ini berbasis Kualitatif Eksploratif, memberikan rekomendasi desain integrasi informasi kependudukan, perpajakan dan perbankan dengan memaksimalkan penggunaan uang elektronik, dan dilakukannya analisa transaksi rekening dan ekualisasi pendapatan dengan memanfaatkan klausul UU No.10 Tahun 1998 terkait pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan agar bisa dilakukan pemotongan pajak secara auto debet kepada setiap warga negara baik yang secara sukarela membayar pajak, maupun yang ditetapkan secara jabatan oleh DJP.

Sistem integratif yang direkomendasikan menggunakan *Operational Information system*, yang menghasilkan informasi yang berkualitas, dan efektif serta efisien.

Kata Kunci: operational information system, *e-Government*, E-KTP, NPWP, Rekening Bank

ABSTRACT

If we hear about the Personal Income Tax, article 21 of UU.36 of 2008 in Indonesia, people will be pictured with a complicated situation in the calculation, payment, and reporting. BPS (Indonesian Statistics Authority), as of August 2012, there were 118.05 million labor force where 112.81 million of them that works. PB Taxand, as the Tax Consultants Office In Indonesia, released on their website that, the number of NPWP (TIN) owners until the end of 2012 is 24.81 million. The breakdown is: 22.13 million personal taxpayers, 2.13 million corporate taxpayers and 545,232 government agencies. The statement described the dilemma of taxpayer compliance perceived in Indonesia. Self Assessment System in Indonesia, has a Loophole in taxation laws refering on subjective and objective requirements related to the taxpayer.

This Qualitative Explorative based research, providing a recommendations design on civil administration information integration, taxation and banking by maximizing the use of electronic money, to analyze the transaction and equalizing the personal income by leveraging clause of Indonesian Banking Law No.10 of 1998 related to the opening of bank secrecy for tax purposes to help the government at gathering taxes by using auto debit to every citizen who voluntarily pay taxes or in officio by the DJP (IRS).

The recommended integrative systems is using the Operational Information System, which is produce high quality, effective and efficient Information.

Keyword: *operational information system, E-Government, Tax Identification Number, Bank Account, E-Identity*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	19

1.5 Sistematika Skripsi.....	20
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Landasan Teori.....	23
2.1.1 Arus Sistem Informasi.....	23
2.1.2 Kualitas Informasi	25
2.2 Pengembangan Sistem Informasi.....	26
2.2.1 Teknologi Sistem Informasi dan Perubahan Organisasi	26
2.2.2 Tahapan Pengembangan Sistem Informasi	28
2.2.3 Proses Pengembangan Sistem dalam Pemecahan Masalah (Pendekatan <i>Problem Solving</i>).....	31
2.3 <i>Customer Relationship Management</i>	33
2.3.1 Pengertian <i>Customer Relationship Management</i>	34
2.4 Operational Information System.....	36
2.4.1 <i>Input Subsystem</i>	37
2.4.2 <i>Database</i>	43
2.4.3 <i>Output Subsystem</i>	49
2.5 Pengambilan Keputusan.....	51
2.5.1 Alat Pendukung dalam Proses Pengambilan Keputusan.....	54

2.6 <i>DecisionSupport System (DSS)</i>	56
2.6.1 Definisi DSS.....	56
2.6.2 Model DSS	58
2.6.3 Alasan penggunaan DSS	60
2.6.4 Tujuan DSS	61
2.6.5 Karakteristik dan kemampuan DSS	62
2.6.6 Berbagai Macam DSS	65
2.6.7 Prosedur Untuk membangun DSS.....	66
2.6.8 Penggunaan DSS	69
2.7 <i>Expert System</i>	71
2.7.1 Pengertian <i>Expert System</i>	71
2.7.2 Konsep dan Struktur <i>Expert System</i>	72
2.8 Pengertian Pendapatan Negara	75
2.9 Identitas Penduduk Indonesia	80
2.9.1 Penduduk Indonesia	80
2.9.2 Identitas Warga Negara Indonesia	80
2.10 Penelitian Sebelumnya.....	84

2.11 <i>Research Question</i> dan Model Analisis.....	87
2.12 Kerangka Berpikir.....	91
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	92
3.1 Pendekatan Penelitian	92
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	93
3.3 Desain Penelitian	95
3.3.1 Pertanyaan Penelitian	95
3.3.2 Unit Analisis.....	95
3.3.3 Kriteria atas Sebuah Temuan	96
3.4 Tahapan Penelitian.....	97
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	102
3.6 Prosedur Pengumpulan Data.....	103
3.7 Teknik Analisis	104
BAB 4 PEMBAHASAN	106
4.1 Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian	106
4.1.1 Direktorat Jenderal Pajak (KPP Karang Pilang Surabaya)	106
4.1.2 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	113

4.1.3 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	118
4.2 Gambaran Sistem Saat Ini.....	124
4.2.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	124
4.2.2 Sistem Informasi DJP.....	150
4.2.3 Sistem Informasi Perbankan.....	158
4.2.4 Uang Kartal Sebagai Alat Pembayaran yang Primitif.....	159
4.2.5 Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Yang Baru.....	162
4.2.6 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Saat Ini	164
4.3 Kelemahan Sistem yang Ada Saat Ini.....	175
4.4 Sistem Yang Direkomendasikan.....	177
4.4.1 Sistem Informasi Nusantara (<i>Beta 0.1</i>)	177
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	297
5.1 Kesimpulan	297
5.2 Saran	299
DAFTAR PUSTAKA	302
LAMPIRAN.....	309

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Ranking 5 Besar Penduduk Dunia Berdasar Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat, per Kamis 6/3/2014	1
Tabel 1.2	Tabel Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran	4
Tabel 1.3	Tabel Volume Transaksi Elektronik Bermotif Belanja	10
Tabel 1.4	Tabel Volume Transaksi Elektronik Bermotif Belanja dalam Persen.....	10
Tabel 1.5	Tabel Volume Transaksi Elektronik Bermotif Transfer Intrabank..	11
Tabel 1.6	Tabel Volume Transaksi Elektronik Bermotif Transfer Intrabank dalam Persen	11
Tabel 1.7	Tabel Volume Transaksi Elektronik Bermotif Transfer Antar bank.....	12
Tabel 1.8	Tabel Volume Transaksi Elektronik Bermotif Transfer Antar bank dalam Persen	13
Tabel 1.9	Tabel Jumlah nominal Transaksi Elektronik Bermotif belanja (dalam Jutaan Rupiah)	14
Tabel 1.10	Tabel Jumlah nominal Transaksi Elektronik Bermotif Transfer Intrabank (dalam Jutaan Rupiah).....	15

Tabel 1.11	Tabel Jumlah nominal Transaksi Elektronik Bermotif Transfer Antarbank (dalam Jutaan Rupiah)	16
Tabel 2.1	Hubungan antara Proses Pengembangan Sistem dan Pendekatan Problem Solving	32
Tabel 3.1	Tahapan Penelitian.....	96
Tabel 4.1	Daftar Bank Persepsi	164
Tabel 4.2	Master Provinsi	232
Tabel 4.3	Master Kabupaten/Kota	232
Tabel 4.4	Master Status Kelahiran.....	233
Tabel 4.5	Master Tanggal Lahir.....	233
Tabel 4.6	Master Jam Lahir	234
Tabel 4.7	Master Jenis Kelamin.....	234
Tabel 4.8	Master Golongan Darah.....	235
Tabel 4.9	Master Provinsi E-KTP.....	235
Tabel 4.10	Master Kabupaten/Kota E-KTP	236
Tabel 4.11	Master RT E-KTP	236
Tabel 4.12	Master RW E-KTP	237
Tabel 4.13	Master Kelurahan/Desa E-KTP	237

Tabel 4.14	Master Kecamatan (E-KTP)	238
Tabel 4.15	Master Agama E-KTP	238
Tabel 4.16	Master Status Perkawinan (E-KTP).....	239
Tabel 4.17	Master Pekerjaan.....	239
Tabel 4.18	Master Kewarganegaraan E-KTP	240
Tabel 4.19	Master Masa Berlaku E-KTP	240
Tabel 4.20	Master Tanggal Pembuatan E-KTP	241
Tabel 4.21	Master PKP	241
Tabel 4.22	Master Transaksi Debet	242
Tabel 4.23	Master Transaksi Kredit	242
Tabel 4.24	Master Masa Pajak	243
Tabel 4.25	<i>Report NiRS</i>	245
Tabel 4.26	<i>Report SKK dalam ERD</i>	246
Tabel 4.27	<i>Report SKK (Lahir dengan Selamat)</i>	248
Tabel 4.28	<i>Report SKK (Lahir Tidak Selamat)</i>	249
Tabel 4.29	Tabel ERD Akta Kelahiran.....	251
Tabel 4.30	<i>Report Usulan Akta Kelahiran</i>	252

Tabel 4.31	Tabel ERD Akta Kematian	253
Tabel 4.32	<i>Report Usulan Akta Kematian</i>	255
Tabel 4.33	Citra Sidik Jari dan Retina	256
Tabel 4.34	<i>Report Usulan Citra Sidik Jari dan Retina</i>	258
Tabel 4.35	Tabel ERD E-KTP	260
Tabel 4.36	<i>Report Usulan Input E-KTP</i>	262
Tabel 4.37	Tabel ERD NPWP	263
Tabel 4.38	<i>Report NPWP</i>	265
Tabel 4.39	Tabel ERD Rekening Bank.....	266
Tabel 4.40	Tabel <i>Report Rekening Bank</i>	268
Tabel 4.41	Tabel Laporan Ekualisasi.....	270
Tabel 4.42	Lapisan Penghasilan Kena Pajak & Tarifnya	273
Tabel 4.43	Tabel PTKP.....	274
Tabel 4.44	Daftar Jenis Pekerjaan dalam Formulir F-2.12	275
Tabel 4.45	Laporan Ekualisasi Transaksi Wajib Pajak	279
Tabel 4.46	Surat Perintah Penagihan	283
Tabel 4.47	<i>Report Usulan Surat Perintah Penagihan</i>	285

Tabel 4.48	Laporan Autodebet Sukses	286
Tabel 4.49	<i>Report Usulan atas Laporan Autodebet Sukses</i>	288
Tabel 4.50	Laporan Autodebet Gagal.....	289
Tabel 4.51	Report Usulan Laporan Autodebet Gagal.....	290
Tabel 4.52	Tabel ERD Surat Setoran Pajak.....	291
Tabel 4.53	Report Usulan Surat Setoran Pajak.....	293
Tabel 4.54	Laporan Pendapatan Negara	294
Tabel 4.55	Report Usulan Laporan Pendapatan Negara	295

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Environment Organization</i>	23
Gambar 2.2	<i>Operational Information System Model</i>	36
Gambar 2.3	<i>Transaction Processing System</i>	38
Gambar 2.4	<i>General Structure Relational Database Management System</i>	45
Gambar 2.5	<i>Hierarchical Database Management System</i>	46
Gambar 2.6	Network Database Management System	47
Gambar 2.7	Gorry and Scott Morton Grid.....	55
Gambar 2.8	DSS Model.....	58
Gambar 2.9	Expert System Model.....	72
Gambar 2.10	Contoh NPWP	82
Gambar 2.11	Kerangka Berpikir.....	90
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak	108
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	109
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	110

Gambar 4.4	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya	113
Gambar 4.5	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya	122
Gambar 4.6	Perekaman E-KTP/Statis/ <i>Online</i> , Data Penduduk Sudah Di Databse	125
Gambar 4.7	Perekaman E-KTP/Statis/ <i>Offline</i> , Data Penduduk Sudah Di Databse	126
Gambar 4.8	Perekaman E-KTP/Perangkat Mobile, Data Penduduk Sudah Di Database	127
Gambar 4.9	Perekaman E-KTP/ <i>Online</i> Penduduk Belum Melakukan Perekaman Di Database	128
Gambar 4.10	Penerbitan E-KTP/ <i>Offline</i> , Data Penduduk Belum Direkam	129
Gambar 4.11	Penerbitan E-KTP Pengganti Di Kelurahan/Kecamatan (Salah Data).....	130
Gambar 4.12	Penerbitan E-KTP Pengganti Di Dinas Kabupaten/Kota (Salah Data).....	131
Gambar 4.13	Penerbitan E-KTP Pengganti Di Dinas Kabupaten/Kota (Salah Foto/Tanda Tangan).....	132

Gambar 4.14 Penerbitan E-KTP Pengganti Di Kelurahan/Kecamatan (Salah Data).....	133
Gambar 4.15 Penerbitan E-KTP Pengganti Di Dinas Kabupaten/Kota (Rusak Fisik)	134
Gambar 4.16 Penerbitan E-KTP Pengganti Di Kelurahan/Kecamatan (Hilang)	135
Gambar 4.17 Penerbitan E-KTP Pengganti Di Dinas Kabupaten/Kota (Hilang)	136
Gambar 4.18 Penerbitan E-KTP Pengganti Di Kelurahan/Kecamatan (Perubahan Elemen Data)	137
Gambar 4.19 Penerbitan E-KTP Pengganti Di Dinas Kabupaten/Kota (Perubahan Data).....	138
Gambar 4.20 Penerbitan E-KTP Pengganti (Migrasi di Wilayah NKRI) <i>Online</i>	139
Gambar 4.21 Penerbitan E-KTP Pengganti (Migrasi di Wilayah NKRI) <i>Online – Lanjutan</i>	140
Gambar 4.22 Penerbitan E-KTP Pengganti (Migrasi di Wilayah NKRI) <i>Online – Lanjutan 2</i>	141
Gambar 4.23 Penerbitan E-KTP Pengganti (Migrasi di wilayah NKRI) <i>Offline</i>	142

Gambar 4.24	Penerbitan E-KTP Pengganti (Migrasi di Wilayah NKRI)	
	<i>Offline – Lanjutan</i>	143
Gambar 4.25	Penggantian E-KTP (Migrasi di Wilayah NKRI) oleh Dinas	
	<i>Online.....</i>	144
Gambar 4.26	Penggantian E-KTP (Migrasi di Wilayah NKRI) oleh Dinas	
	<i>Offline.....</i>	145
Gambar 4.27	Penggantian E-KTP (Migrasi di Wilayah NKRI) oleh Dinas	
	<i>Offline – Lanjutan</i>	146
Gambar 4.28	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP	152
Gambar 4.29	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP	
	Melalui KP2KP	154
Gambar 4.30	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan PKP	155
Gambar 4.31	Indikator Sistem Pembayaran	160
Gambar 4.32	Perbandingan Pembayaran Pajak Cara Lama dengan Cara	
	Baru	170
Gambar 4.33	Diagram Konteks Administrasi SIN	179
Gambar 4.34	DFD Level 0 Administrasi SIN	181
Gambar 4.35	DFD Level 1 Proses 1.0 Administrasi SIN Pembuatan	
	NIK/E-KTP	183

Gambar 4.36	DFD Level 1 Proses 2.0 Administrasi SIN Pembuatan NPWP	185
Gambar 4.37	DFD Level 1 Proses 3.0 Administrasi SIN Pembuatan Rekening Bank	187
Gambar 4.38	DFD Level 1 Proses 4.0 Administrasi SIN Pengelolaan Database Nasional (SIN).....	189
Gambar 4.39	Level 0 Keuangan SIN	192
Gambar 4.40	DFD Level 1 Proses 1.0 Keuangan SIN Pengukuhan PKP	195
Gambar 4.41	DFD Level 1 Proses 2.0 Keuangan SIN Pencatatan Transaksi	197
Gambar 4.42	DFD Level 1 Proses 3.0 Keuangan SIN Pencatatan Transaksi	198
Gambar 4.43	DFD Level 1 Proses 4.0 Keuangan SIN Otomatisasi Pengukuhan	200
Gambar 4.44	DFD Level 1 Proses 5.0 Keuangan SIN Otomatisasi Pengukuhan	201
Gambar 4.45	Flowchart SIN (Perekaman Data Kelahiran)	204
Gambar 4.46	Flowchart SIN (Pembuatan NIK).....	206
Gambar 4.47	Flowchart SIN (Perekaman Biometrik)	208

Gambar 4.48	Flowchart SIN (Pembuatan NPWP)	210
Gambar 4.49	Flowchart SIN (Pembuatan Rekening Bank).....	212
Gambar 4.50	Flowchart SIN (Pengukuhan PKP)	214
Gambar 4.51	Flowchart SIN (Data Mining)	216
Gambar 4.52	Flowchart SIN (Otomatisasi Pengukuhan)	218
Gambar 4.53	Flowchart SIN (Penyediaan Mesin EDC Link untuk PKP)	220
Gambar 4.54	Flowchart SIN (Pembukaan Rekening Wajib Pajak).....	222
Gambar 4.55	Flowchart SIN (Pembayaran Pajak).....	224
Gambar 4.56	Flowchart SIN (Pemeriksaan Sistem Pengenaan Pajak).....	227
Gambar 4.57	Flowchart SIN (Pemeriksaan Sistem Pembayaran Pajak)	230
Gambar 4.58	ERD SIN	230
Gambar 4.59	<i>Operational Information System Model</i>	231
Gambar 4.60	Relasi NIRS dengan Tabel Master	244
Gambar 4.61	Relasi SKK dengan Tabel Report & Master	247
Gambar 4.62	Relasi Akta Kelahiran dengan SKK.....	251
Gambar 4.63	Hubungan antara Tabel SKK dengan Tabel Akta Kematian	254
Gambar 4.64	Hubungan Tabel Citra Sidik Jari Dan Retina dengan Tabel Akta Kelahiran	257

Gambar 4.65 Hubungan E-KTP dengan Report Sebelumnya dan Master Pendukungnya	261
Gambar 4.66 Hubungan NPWP dengan Report Sebelumnya dan Master Pendukungnya	264
Gambar 4.67 Hubungan Rekening Bank dengan Report Sebelumnya dan Master Pendukungnya	267
Gambar 4.68 Hubungan Laporan Ekualisasi dengan Rekening Bank dan Master Pendukungnya	271
Gambar 4.69 Hubungan Master Transaksi Debet, Master Transaksi dengan Rekening Bank untuk Menyediakan Subsistem Intelejen.....	281
Gambar 4.70 Hubungan SPP dengan Laporan Ekualisasi	284
Gambar 4.71 Hubungan Laporan Autodebet sukses dengan Surat Perintah Penagihan	287
Gambar 4.72 Hubungan Laporan Autodebet Gagal dengan Surat Perintah Penagihan	289
Gambar 4.73 Hubungan Surat Setoran Pajak dengan Laporan Autodebet Sukses.....	292
Gambar 4.74 Hubungan Laporan Pendapatan negara dengan SS.....	294

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	306
Lampiran 2	Permohonan Ijin Penelitian (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya).....	307
Lampiran 3	Permohonan Ijin Penelitian (Bank Indonesia).....	308
Lampiran 4	Permohonan Ijin Penelitian (Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil 1 Surabaya).....	309
Lampiran 5	Pemberian Ijin Penyusunan Skripsi (DJP Kanwil 1 Surabaya) ...	310
Lampiran 6	Tanda Terima Permohonan Ijin Penelitian (Bank Jatim)	311
Lampiran 7	Struktur Organisasi DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus	312
Lampiran 8	Struktur Organisasi (KPP WP Besar dan KPP Madya).....	313
Lampiran 9	Struktur Organisasi (KPP Pratama).....	314
Lampiran 10	Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Statis yang <i>On-line</i> (Data Sudah Terdaftar dalam <i>Database</i> Kependudukan).....	315

Lampiran 11 Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Statis yang <i>Off-line</i> (Data Sudah Terdaftar dalam <i>Database</i> Kependudukan).....	316
Lampiran 12 Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat <i>Mobile</i> (Data Sudah Terdaftar dalam <i>Database</i> Kependudukan).....	317
Lampiran 13 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Bagi Penduduk yang Belum Melakukan Perekaman dan Tidak Terdaftar dalam <i>Database</i> Kependudukan, Melalui Pelayanan SIAK yang Sudah Tersambung (<i>On-line</i>)	318
Lampiran 14 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Bagi Penduduk yang Belum Melakukan Perekaman (Data Belum Terdaftar dalam <i>Database</i> Kependudukan), Melalui Pelayanan SIAK yang Belum Tersambung (<i>Off-line</i>)	319
Lampiran 15 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Pengganti (Salah Data), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/ Kelurahan	320
Lampiran 16 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Pengganti (Salah Data), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/ Kota	321
Lampiran 17 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-el Pengganti (Salah Pas Photo dan/atau Tanda Tangan)	322

Lampiran 18 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Rusak Secara Fisik), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan	323
Lampiran 19 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Rusak Secara Fisik), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota.....	324
Lampiran 20 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Hilang), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan	325
Lampiran 21 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Hilang), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota	326
Lampiran 22 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perubahan Elemen Data), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el Kecamatan/Kelurahan	327
Lampiran 23 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perubahan Elemen Data), Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota	328
Lampiran 24 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perpindahan Penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia), dalam 1 Kabupaten/Kota <i>Online</i>	329

Lampiran 25 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perpindahan Penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia), dalam 1 Kabupaten/Kota <i>Offline</i>	330
Lampiran 26 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perpindahan Penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia), dalam 1 Kabupaten/Kota di Dinas.....	331
Lampiran 27 SOP Pelayanan Penerbitan KTP-El Pengganti (Perpindahan Penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia), Perpindahan antar Kabupaten/Kota	332
Lampiran 28 SOP Pengiriman Data Hasil Perekaman, Secara <i>On-line</i>	333
Lampiran 29 SOP Pengiriman Data Hasil Perekaman, Secara <i>Off-line</i>	334
Lampiran 30 SOP Pencetakan Dokumen KTP Elektronik	335
Lampiran 31 SOP Pendistribusian KTP-El Kepada Penduduk	336
Lampiran 32 Transkrip Wawancara.....	337